

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI DESA TRIMULYO
KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(Skripsi)

Oleh

**EGI YUNITASSARI
NPM 1916041022**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI DESA TRIMULYO
KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh

EGI YUNITASSARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI DESA TRIMULYO KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

EGI YUNITASSARI

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin mengalami perkembangan. Pembangunan desa harus diiringi dengan inovasi teknologi dan komunikasi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemerintah mengeluarkan beberapa program sebagai bentuk inovasi, yaitu melalui program *smart village*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisa mengenai pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat serta hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ukuran dan tujuan kebijakan sudah jelas, indikator sumber-sumber kebijakan belum maksimal karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran dana, indikator komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sudah berjalan efektif, indikator karakteristik-karakteristik agen pelaksana cukup menerima dengan baik adanya program *smart village*, indikator kecenderungan pelaksana (implementor) cenderung menerima dengan baik, namun untuk partisipasi dari perangkat desa dan masyarakat masih belum aktif, indikator kondisi ekonomi, sosial, dan politik cukup mendukung pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo.

Kata Kunci: Implementasi, *Smart Village*, Teknologi Informasi dan Komunikasi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SMART VILLAGE PROGRAM IN TRIMULYO VILLAGE GEDUNG SURIAN DISTRICT WEST LAMPUNG REGENCY

By

EGI YUNITASSARI

The use of information and communication technology is currently growing. Village development must be accompanied by technological and communication innovations in order to adapt to the times. The government issued several programs as a form of innovation, namely through programs smart village. This study aims to obtain a description and analysis of program implementation smart village in Trimulyo Village, Gedung Surian District, West Lampung Regency and the obstacles experienced in implementing the program. In this study, researchers used a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the indicators of size and policy objectives are clear, indicators of policy resources are not maximized due to limited quality of human resources and limited budget funds, indicators of communication between related organizations and implementation activities have been running effectively, indicators of characteristics - the characteristics of the implementing agency are quite accepting of the program smart village, indicators of the tendency of implementers (implementors) tend to be well received, but participation from village officials and the community is still not active, indicators of economic, social and political conditions are sufficient to support program implementation smart village in the village of Trimulyo.

Keywords: Implementation, Smart Village, Information and Communication Technology

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM
SMART VILLAGE DI DESA
TRIMULYO KECAMATAN
GEDUNG SURIAN KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Egi Yunitassari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916041022**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP. 198212122008012017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meilhyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**

Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**

Penguji Utama : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 September 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 08 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Egi Yunitassari
NPM. 1916041022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Egi Yunitassari dilahirkan di Sukapura, 05 Mei 2000 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Bapak Abdi Sutasman dan Ibu Yuni Purwanti.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK RA Yapsi Sukapura pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SDN 01 Sukapura pada 2007-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sumberjaya pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sumberjaya pada tahun 2016-2019. Pada 2019 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA), Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Pekon Sukamulya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, kemudian menjadi asisten Laboratorium Administrasi Kebijakan Publik (Lab AKP) FISIP UNILA, serta melaksanakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”

(Buya Hamka)

“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S. Al-Baqarah 2: 195)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)

“Lalui setiap prosesnya. Yakinkanlah sebuah proses merupakan bagian dari pembelajaran hidup yang sangat berharga. Ketika kita sudah sampai diakhir, kita akan merasakan manisnya hasil dari sebuah proses yang telah kita lalui. *If you can dream it, you can make it happen.*”

(Egi Yunitassari)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terucapkan atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT. berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Mama tercinta

Bapak Abdi Sutasman dan Ibu Yuni Purwanti

Terimakasih atas kasih sayang, do'a, dan dukungan yang selalu diberikan sehingga aku dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

Adikku

Muhammad Yuda Gifari

Terimakasih untuk teman-teman di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program *Smart Village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat” sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
2. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. dan Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, terimakasih atas kritik, saran, masukan, serta semangat yang diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembahas, terimakasih atas kritik, saran, dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan nasihatnya.

5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang ibu dan bapak berikan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Abdi Sutasman dan Ibu Yuni Purwanti. Terimakasih telah mendidik Penulis dengan baik, selalu mendoakan dan mendukung setiap proses yang Penulis lalui. Terimakasih selalu kebersamai dan memberikan semangat serta motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Terimakasih banyak pak, maa.
7. Kepada Adik Penulis, Muhammad Yuda Gifari terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
8. Kepada informan Penulis, Bapak Buchori, Bapak Hadi Waluyo, Bapak Iswanto, Bapak Supriadi, Ibu Fitriyah, Bapak Adi Santoso, Bapak Siswono, Ibu Desi Kurniasari, Ibu Ria Akfrijulia Nasir, Ibu Vevi Fitriliani, dan Bapak Zulkarnain. Terimakasih atas waktu dan informasi yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada seluruh staff dan jajaran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, terimakasih atas waktu, tempat, dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama kegiatan Magang MBKM di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
10. Kepada Sahabat Penulis Bend Papoy, Bella, Nisha, dan Denada. Terimakasih telah kebersamai Penulis dari TK sampai saat ini.
11. Kepada Sahabat Penulis selama berkuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Pasukan Elite W, Anin, Nanda, Ayu, Amalia, Faradipa dan Kezia. Terimakasih telah kebersamai dan selalu memberikan dukungan positif selama masa perkuliahan Penulis.
12. Kepada tim seminar Penulis selama proses penyusunan skripsi Penulis di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Nina, Dinda, Oliv, Zahra, Laila, Anada, Marfu'Ah dan Jono. Terimakasih telah kebersamai dan selalu hadir dalam setiap proses seminar dan ujian skripsi Penulis.

13. Kepada Sahabat Penulis di KKN Sukamulya, Salsa, Rhica, Annisa, dan Herlina. Terimakasih telah kebersamai Penulis sejak KKN sampai saat ini.
14. Kepada seluruh teman-teman Granada, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih banyak.
16. Kepada diri sendiri, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan segala prosesnya. Terimakasih sudah kuat dan bertahan sejauh ini. Terimakasih kepada hati yang selalu kuat dan ikhlas dalam menjalani setiap proses dalam penyelesaian skripsi ini. Mari terus bekerjasama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
17. Kepada orang-orang yang selalu bertanya kapan lulus, terimakasih atas pertanyaannya yang membuat Penulis semakin termotivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis,

Egi Yunitassari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	10
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	12
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi	13
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	15
2.3.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan	16
2.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	25
2.4 Tinjauan Tentang <i>Smart Village</i>	26
2.5 Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian	40
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Hasil Penelitian	50
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	81
4.4 Faktor Penghambat Implementasi Program <i>Smart Village</i> di Desa Trimulyo.....	93
V. SIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Matriks Penelitian Terdahulu	8
2. Narasumber Wawancara	42
3. Struktur Pemerintahan Desa Trimulyo	48
4. Batas Wilayah Desa Trimulyo	49
5. Luas Wilayah Desa Trimulyo	49
6. Jumlah Penduduk Desa Trimulyo	50
7. Indikator Pencapaian Program <i>Smart Village</i> yang Telah Terealisasi.....	83

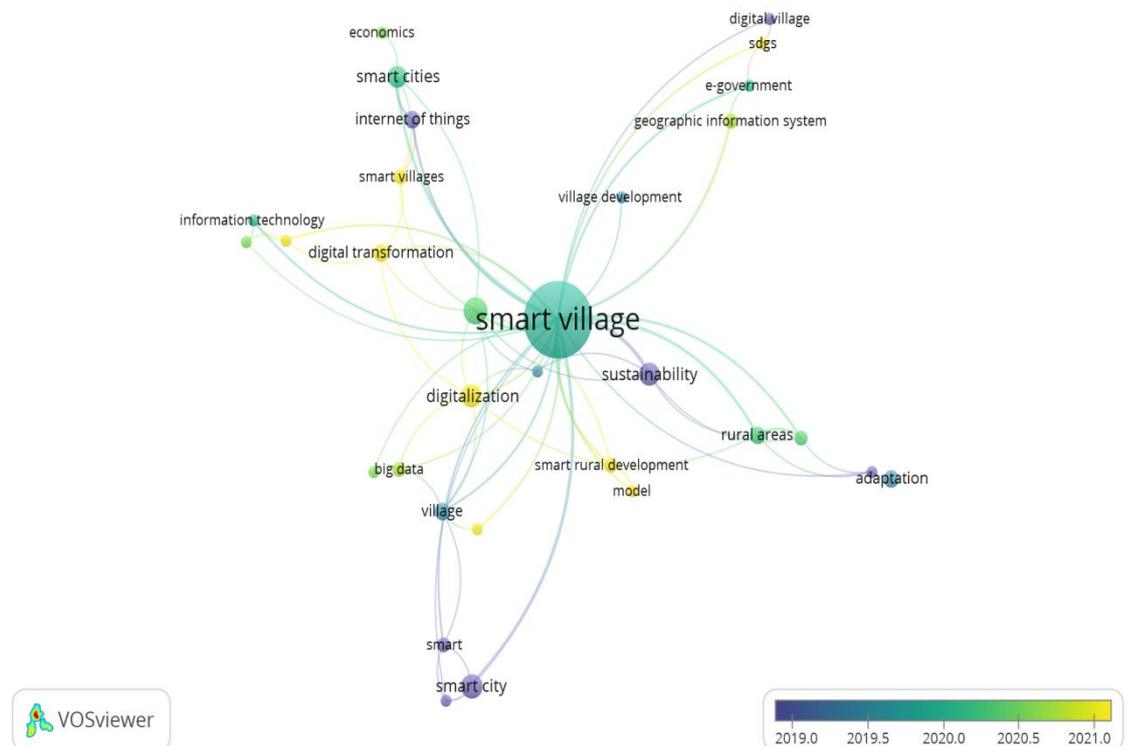
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Visualisasi <i>Overlay Smart Village</i>	2
2. Visualisasi <i>Density Smart Village</i>	3
3. Kerangka Pikir	35
4. Tampilan Laman Utama Website Desa Trimulyo	51
5. Tampilan Laman Menu Website Desa Trimulyo	52
6. Sosialisasi Program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	58
7. Struktur Organisasi Desa Trimulyo	62
8. Trimulyo Service Center (TSC)	64
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Desa Trimulyo	65
10. Alat Tap KTP	65
11. Penampakan Wisata Alam Temiangan <i>Hill</i>	73
12. Perkemahan Temiangan <i>Hill</i>	74
13. Akun Instagram Temiangan <i>Hill</i>	77
14. Akun Facebook Temiangan <i>Hill</i>	78

I. PENDAHULUAN

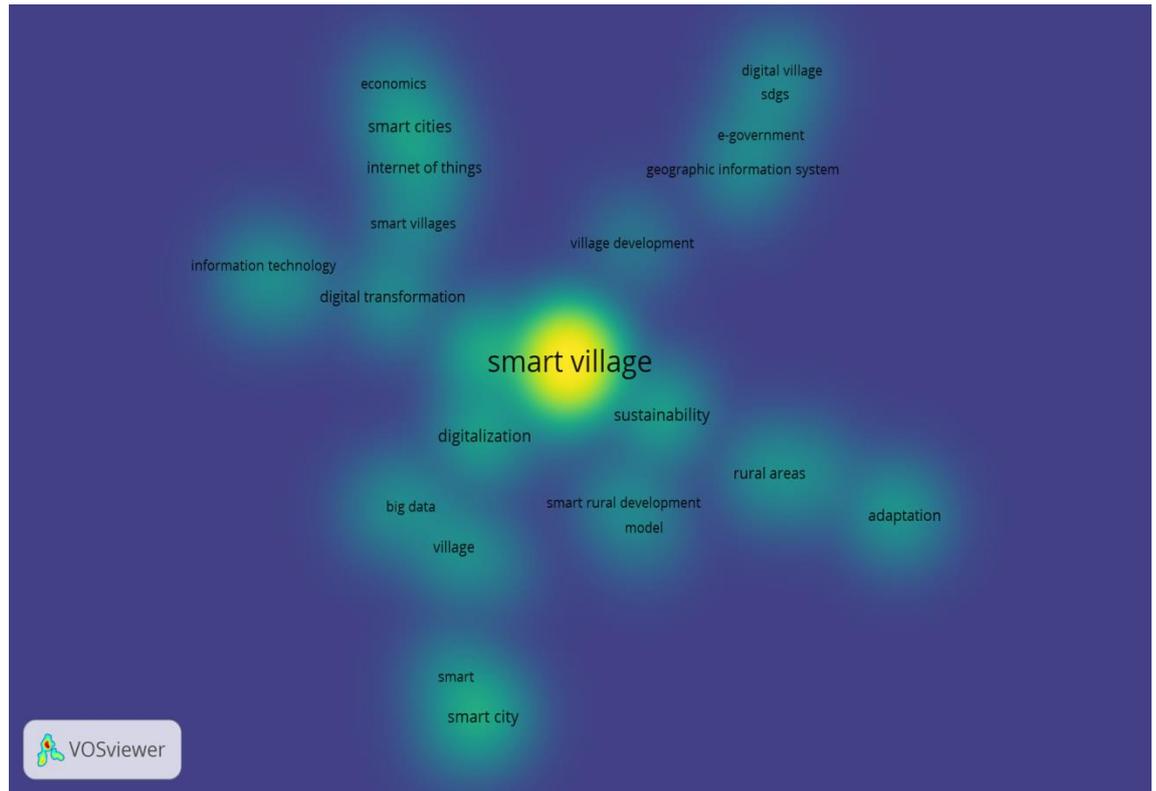
1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pembangunan desa melalui program-program desa yang inovatif menginisiasi munculnya model pembangunan desa berbasis konsep *smart village*. Konsep ini diadopsi dari konsep *smart city* yang lebih dulu dikenal di Indonesia. Istilah *smart village* mulai dipakai oleh beberapa desa di Indonesia. Istilah *smart village* diterjemahkan sebagai sebutan desa “cerdas”. Istilah “*smart*” digunakan dalam rangka melawan stigma desa yang telah lama melekat pada desa, seperti: desa dianggap tidak berpendidikan, terbelakang, miskin, ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Saat ini desa dianggap mampu melakukan pembangunan masyarakatnya secara cerdas. Bahasan tentang *smart village* menjadi sebuah kajian yang menarik karena dua hal. Pertama, ini merupakan kajian yang baru yang nantinya akan memperkaya kajian-kajian lain tentang desa, khususnya kajian tentang inovasi desa. Kedua, masih banyak ditemukannya gap antara kajian teoritis konseptual tentang *smart village* dengan implementasi *smart village* di Indonesia (Subekti, 2019).



Gambar 1. Visualisasi *overlay smart village*
 Sumber : Hasil Analisis Vosviewer, 2023.

Berdasarkan hasil penelusuran tentang *smart village* menggunakan aplikasi Vosviewer yang dilakukan oleh peneliti, dari tahun 2010-2022 dapat dilihat bahwa penelitian mengenai *smart village* mulai banyak dilakukan pada tahun 2019. Konsep yang berkaitan dengan *smart village* ini juga beragam, dapat dilihat dari hasil analisis Vosviewer di atas terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan *smart village*. Pada tahun 2019 penelitian mengenai *smart village* lebih berfokus pada *smart city*, *internet things*, dan *adaptation* dimana konsep-konsep tersebut yang melatarbelakangi adanya *smart village*. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya penelitian mengenai *smart village* mulai berkembang dengan berbagai konsep baru seperti *e-government*, *digital transformation*, *information technology*, *smart development*, *digitalization*, *public services*, *digital village*, dan lain-lain.



Gambar 2. Visualisasi *density smart village*
 Sumber : Hasil Analisis Vosviewer, 2023.

Keterbaruan dalam penelitian tentu dibutuhkan untuk membedakan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi Vosviewer di atas dapat terlihat penelitian mengenai konsep *smart village* sangat beragam. Konsep yang berkaitan dengan *smart village* ini tentu saja berhubungan dengan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembangunan sehingga menghasilkan pembangunan yang cerdas (*smart development*). Dalam melakukan pembangunan di desa tentu saja terdapat beberapa variabel yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Program *smart village* ini memiliki beberapa variabel dalam pelaksanaannya, yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment* (Herdiana, 2019).

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga berkaitan dengan program *smart village* yang dilaksanakan di salah satu desa di Provinsi Lampung. Pada penelitian yang akan dilakukan ini peneliti menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan *smart village* seperti *smart government*,

smart community, dan *smart environment* yang belum banyak diteliti sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan program *smart village* dengan mengacu pada variabel pelaksanaan *smart village* tersebut.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang saat ini sedang gencar melaksanakan program *smart village* sebagai salah satu program kerja Gubernur Lampung untuk meningkatkan pelayanan publik yang terpadu dan memajukan daerah tertinggal terutama daerah pedesaan. Maka dari itu, dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024. Peraturan Gubernur Lampung tersebut berisi beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut.

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju dan berkejahteraan di wilayah Provinsi Lampung.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan *Smart Village* di Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada nomor 1 dan 2 maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Pada era perkembangan teknologi informasi saat ini pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Pemanfaatan berbagai teknologi informasi dapat memberikan dampak positif

bagi pemerintahan, misalnya saja dalam proses pelayanan publik dengan adanya perkembangan teknologi menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam rangka mendukung pemanfaatan teknologi informasi tersebut Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program *smart village* di berbagai desa yang ada di Provinsi Lampung agar pemerataan pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan potensi desa menjadi desa yang berkembang dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Lampung Barat merupakan kabupaten yang terletak di ujung Provinsi Lampung dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Lampung Barat berdiri pada tahun 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Barat pernah masuk dalam kategori daerah tertinggal di Provinsi Lampung. Namun, pada tahun 2019 Kabupaten Lampung Barat berhasil keluar dari kategori daerah tertinggal di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 79/2019 Tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019. Selain itu, pada tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat juga telah keluar dari kategori desa tertinggal.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No.G/228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Provinsi Lampung, pada tahun 2020 Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu desa dari 30 desa yang dicanangkan sebagai *smart village* oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Desa Trimulyo merupakan salah satu desa di Kabupaten Lampung Barat yang mengalami perkembangan dengan pesat. Pada tahun 2022 Desa Trimulyo menjadi perwakilan Kecamatan Gedung Surian dalam lomba desa tingkat kabupaten yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan mendapatkan juara 1 dari 15 desa yang mewakili masing-masing kecamatan. Selain itu, Desa Trimulyo juga mewakili Kabupaten Lampung Barat dalam lomba desa tingkat provinsi dan masuk dalam kategori lima besar perkembangan desa Provinsi Lampung dari 13 kabupaten di Provinsi

Lampung yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Selain itu, dalam bidang keparwisataan juga Desa Trimulyo memiliki destinasi wisata yang telah dikenal oleh banyak orang, yaitu Temiangan *Hill*. Melihat berbagai potensi yang ada di Desa Trimulyo ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat terutama dalam pelaksanaan program *smart village* yang dilaksanakan di Desa Trimulyo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh deskripsi dan analisa mengenai pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.
2. Teridentifikasinya faktor penghambat dalam pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam kajian implementasi kebijakan sebagai bagian dari tahapan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu, penelitian terdahulu berguna untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk mendukung pemahaman yang lebih mendetail, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang menjadi referensi yang relevan dalam memperkaya kajian pada penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Relevansi Penelitian
1.	Tiara Nirmala (2022)	Pengembangan <i>Smart Village</i> Menuju Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana mengembangkan Desa Way Huwi yang memiliki berbagai potensi di bidang ekonomi untuk menuju <i>smart village</i> , salah satunya dengan cara memanfaatkan teknologi dalam melakukan pemasaran (<i>e-</i>	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena pada penelitian tersebut pelaksanaan program <i>smart village</i> diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan, pada penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus

			<i>marketing</i>).	pada pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, tetapi peneliti juga berfokus pada pelaksanaan program <i>smart village</i> dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa.
2.	Anisa Ana Fitrianti (2021)	Efektivitas Inovasi Program <i>Smart Kampung</i> di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini berfokus pada efektivitas program <i>smart kampung</i> dalam melaksanakan <i>e-government</i> di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena pada penelitian tersebut peneliti hanya berfokus pada efektivitas inovasi program <i>smart kampung</i> dengan menerapkan <i>e-government</i> di pemerintahan desa. Sedangkan, pada penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus pada konsep <i>e-government</i> , tetapi juga pada pemanfaatan teknologi informasi dalam komunitas masyarakat dan lingkungan di desa sehingga pelaksanaan <i>smart village</i> dapat tercapai.

3.	Tia Subekti dan Ratnaningsih (2019)	Penerapan Model <i>Smart Village</i> dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang	Penelitian ini befokus untuk melihat pengembangan <i>smart village</i> di Kabupaten Malang dengan titik fokus pada pengembangan ekowisata berbasis <i>smart village</i> di Desa Sanankerto Kabupaten Malang.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena pada penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan <i>smart village</i> di bidang pariwisata. Sedangkan, pada penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus pada aspek pengembangan pariwisata saja, tetapi kepada pelayanan pemerintahan desa yang berhubungan dengan pelaksanaan program <i>smart village</i> .
----	-------------------------------------	--	--	---

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023.

Berdasarkan perbandingan ketiga penelitian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki judul “Implementasi Program *Smart Village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat” yang memiliki kesamaan pada program yang diimplementasikan, yaitu mengenai program *smart village*. Akan tetapi, tidak menjamin hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya karena terdapat perbedaan fokus dan lokus penelitian.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana dapat kita pahami sebagai aturan atau peraturan. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan umum membutuhkan penyelesaian masalah, maka dibutuhkan sebuah

penyelesaian dengan cara memformulasikan suatu kebijakan yang kemudian disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik ini sangat berkaitan dengan administrasi negara, dimana ketika pemerintah sebagai aktor publik mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik (Sore, 2017).

Menurut Anderson dalam Muadi (2016) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok untuk memecahkan masalah tertentu. Sedangkan, menurut Pasolong dalam Herdiana (2018) kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Dari pengertian mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan berbagai rangkaian tindakan yang dipilih dan dilaksanakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi (Anggara, 2014).

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis

kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003) terdapat beberapa tahapan dalam kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan proses paling awal dalam kebijakan publik. Dalam proses penyusunan agenda terdapat ruang untuk memahami masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang akan dilakukan. Penyusunan agenda ini merupakan tahapan yang penting untuk menentukan apakah suatu isu publik dapat diangkat menjadi agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan

Setelah tahapan penyusunan agenda dilakukan, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah membahas masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan dengan para pembuat kebijakan. Dalam tahap formulasi kebijakan terdapat berbagai alternatif kebijakan yang kemudian setiap alternatif kebijakan tersebut akan dipilih sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tahapan legitimasi kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Dengan adanya legitimasi kebijakan maka alternatif kebijakan yang telah dibuat tersebut berdasarkan dari dukungan mayoritas legislatif, konsensus di antara lembaga atau keputusan peradilan sehingga kebijakan tersebut sah untuk di implementasikan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dimana sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan kemudian di laksanakan oleh berbagai unit administrasi pemerintah.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Berdasarkan tahapan dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) tersebut yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tahapan implementasi kebijakan yang merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan. Tahap implelementasi ini merupakan tahap untuk melihat bagaimana realisasi dari kebijakan yang telah disusun dan dirumuskan oleh pembuat kebijakan dilaksanakan.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi

Perkembangan studi implementasi muncul pada tahun 1970-an. Terdapat sebuah studi yang dianggap sebagai awal dari perkembangan studi implementasi, yaitu sebuah tulisan dari Pressman dan Wildavsky yang berjudul "*implementation*" yang menghasilkan suatu pendekatan yang bersifat rasional perspektif dengan model sudut pandang *top-down* (Anggara, 2014). Menurut Sabatier dan Mazmanian dalam Sopiansyah et. al. (2017) dijelaskan beberapa bentuk model implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Model *top-down*. Model *top-down* mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan efektif jika birokrasi pelaksanaannya mematuhi peraturan yang ditetapkan. Inti dari model *top-down* yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian ini melihat implementasi kebijakan dari tiga variabel, yaitu karakteristik masalah, struktur manajemen program, dan faktor-faktor di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan seperangkat kondisi yang optimal, dimana implelementor kebijakan sebagai aktor pelaksana harus ahli di bidangnya.

2. Model *bottom-up*. Model ini merupakan proses kebijaksanaan dari perspektif perubahan sosial dan politik. Pada model *bottom-up* ini kebijakan pemerintah dibuat untuk membuat perubahan dalam masyarakat. Model *bottom-up* menekankan bahwa proses politik tidak berhenti saat sebuah kebijakan telah diputuskan, tetapi berlangsung juga pada level pelaksana tingkat bawah yang banyak menentukan tingkat keberhasilan dari kebijakan yang diimplementasikan.
3. Model sintesis. Model ini lebih menekankan bahwa suatu kebijakan akan berjalan secara efektif jika dalam pelaksanaannya memperhatikan dua kelompok kepentingan. Sabatier mengemukakan bahwa sintes yang memperhatikan dua kepentingan (model *top-down* dan *bottom-up*) akan mendapatkan keseimbangan dalam memperoleh kepentingan.

Menurut Gogin et. al. (1990) dalam (Anggara, 2014) terdapat perbedaan era dan fokus implementasi kebijakan, yaitu:

1. Penelitian Generasi Pertama berfokus pada suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan program, menguraikan sifat kerumitan dan dinamika proses implementasi, menekankan pentingnya subsistem kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil suatu program serta mendiagnosis beberapa penyakit yang sering mengganggu proses implementasi.
2. Penelitian Generasi Kedua berfokus pada jenis dan isi kebijakan, organisasi pelaksana dan sumber daya, pelaksana kebijakan: sikap, motivasi, hubungan antar pribadi, komunikasi, serta hasil: pengakuan bahwa implemenatasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan dan berbagai persoalan yang muncul.
3. Penelitian Generasi Ketiga berfokus pada bentuk komunikasi antar lembaga pemerintah, penyusunan desain penelitian, serta mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi.

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang dalam bahasa Indonesia berarti mengimplementasikan. Terdapat beberapa pengertian implementasi menurut para ahli. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014) implementasi kebijakan dapat diartikan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan, menurut Winarno dalam (Yuliah, 2020) implementasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan berbagai sarana tertentu dan waktu yang telah ditentukan.

Aktivitas utama yang dilakukan dalam proses implementasi menurut Silalahi dalam (Subianto, 2020) meliputi tiga poin utama, yaitu:

1. Interpretasi yang berarti menerjemahkan makna program ke dalam peraturan yang diterima dan dilaksanakan.
2. Organisasi yang berarti unit untuk menempatkan program ke dalam dampak.
3. Aplikasi yang berhubungan dengan perlengkapan rutin yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan berbagai tindakan dan usaha yang dilakukan oleh aktor pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat dimana dalam prosesnya implementasi memiliki tiga aktivitas utama yang mencakup interpretasi, organisasi, dan aplikasi.

2.3.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Pendekatan implementasi memiliki berbagai macam model yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Berikut ini beberapa pendekatan implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

a. Pendekatan Implementasi Edward III

Menurut Edward III dalam (Abdoellah dan Rusfiana, 2016) implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial karena pada tahapan ini jika suatu kebijakan atau program tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang menjadi sasaran pembuatan kebijakan maka kebijakan atau program tersebut kemungkinan besar akan mengalami kegagalan meskipun telah diimplementasikan dengan baik. Selain itu, suatu kebijakan atau program juga mungkin saja mengalami kegagalan jika kebijakan atau program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan (implementor kebijakan). Maka dari itu, Edward III memperkenalkan model pendekatan implementasi dengan menggunakan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi

Menurut Edward III terdapat tiga komponen penting yang ada dalam komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu saja hal yang diperlukan adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh setiap pelaksana. Maka dari itu, dibutuhkan komunikasi yang jelas agar para pelaksana kebijakan tidak mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber menjadi faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Tanpa sumber-sumber yang memadai pelaksanaan program tidak akan berjalan secara optimal. Sumber-sumber yang penting ini mencakup staf, informasi, dan wewenang. Staf

merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. kecakapan dan keterampilan staf menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, sumber informasi menjadi sumber yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu informasi mengenai bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan dan informasi mengenai data tentang ketaatan pelaksana kebijakan terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Wewenang juga merupakan sumber yang penting dalam implementasi kebijakan. Wewenang ini akan berbeda-beda antara satu program dengan program lainnya serta memiliki bentuk wewenang yang berbeda pula tergantung pada program yang diimplementasikan.

3. Sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap pelaku)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan memiliki konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan maka kebijakan yang diimplementasikan mendapatkan dukungan dan kemungkinan besar para pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan para pembuat kebijakan. Namun, jika perspektif pelaksana kebijakan ini berbeda dengan pembuat kebijakan akan membuat pelaksanaan kebijakan sulit untuk diimplementasikan.

4. Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan dilakukan oleh implementor. Birokrasi merupakan struktur organisasi yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan atau program. Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu saja dibutuhkan prosedur operasional standar (*Standard Operational Prosedur*) sebagai pedoman bagi implementor agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

b. Pendekatan Implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Situmorang, 2016) terdapat enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Pendekatan implementasi Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel bebas dan variabel mengikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi menjelaskan juga hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Berikut ini beberapa variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terkait hubungan antara kebijakan dan pencapaian (*performance*).

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ukuran dan tujuan kebijakan ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian tujuan kebijakan. Tahapan indentifikasi berbagai indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam implementasi kebijakan karena indikator inilah yang dapat mengukur sejauhmana ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan ini berguna untuk menguraikan berbagai tujuan kebijakan secara menyeluruh dan menjelaskan apakah implementasi kebijakan yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Namun, terdapat beberapa kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Meter dan Van Horn mengemukakan dua kemungkinan alasan hal tersebut terjadi. Pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan berbagai kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber ini merupakan penunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan ini mencakup sumber daya manusia (*human resources*) sebagai pelaksana kebijakan serta sumber dana (*non-human*

resources) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi sehingga berjalan dengan efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya sumber dana akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, sangat penting untuk memberikan perhatian terhadap kejelasan ukuran dan tujuan implementasi kebijakan dengan cara menjalin komunikasi yang baik antar aktor pelaksana sehingga ukuran dan tujuan kebijakan dapat dikomunikasikan dengan jelas dan para pelaksana dapat mengetahui apa yang menjadi ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan.

4. Karakteristik-karakteristik badan pelaksana

Komponen dari karakteristik badan-badan pelaksana ini memiliki ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut yang tidak formal dari personil mereka. Ikatan antar badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta penyampaian sistem kebijakan perlu diperhatikan. Karakteristik badan pelaksana ini berkaitan dengan karakteristik dari organisasi yang menerima atau menolak suatu program yang akan diimplementasikan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu :

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- d. Vitalitas suatu organisasi;

- e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Kecenderungan pelaksana (implementor)

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan akan ditentukan dengan sikap pelaksana kebijakan tersebut apakah kebijakan tersebut mendapatkan penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan (implementor). Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan para aktor pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, berbagai tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan tersebut. Pemahaman para pelaksana mengenai tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan menjadi hal yang penting. Jika implementasi suatu kebijakan ingin berhasil diimplementasikan maka harus ada kesadaran dari para pelaksana kebijakan. Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan juga menjadi hal yang penting. Para pelaksana suatu kebijakan mungkin saja gagal mengimplementasikan kebijakan jika dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan karena menolak tujuan yang ada dalam kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika para pelaksana menerima ukuran dasar dan tujuan kebijakan maka dapat mendorong implementasi berhasil dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-

kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Menurut Van Meter dan Van Horn variabel mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik menjadi faktor yang berpengaruh dalam pencapaian implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn memberikan beberapa pertimbangan pernyataan terkait lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan, yaitu:

- a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?
- b. Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
- c. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
- d. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
- e. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
- f. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

c. Pendekatan Implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam (Anggara, 2014) pengimplementasian sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context* (konteks) dari kebijakan tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai *content* dan *context* kebijakan menurut Grindle.

1. *Content of policy* (isi kebijakan)

Isi kebijakan atau program tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Menurut Grindle terdapat beberapa isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi, yaitu sebagai berikut.

- a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program. Jika suatu kebijakan atau program tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maka kebijakan atau program tersebut akan lebih mudah diimplementasikan karena tidak menimbulkan perlawanan dari pihak kepentingan yang dirugikan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Kebijakan atau program yang diimplementasikan tentu saja harus dapat memberikan manfaat pada orang banyak agar implementasi kebijakan atau program tersebut mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.
- c) Jangkauan perubahan yang diinginkan. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan karena jangkauan perubahan yang luas dan besar akan membutuhkan waktu yang lama untuk dicapai.
- d) Kedudukan pengambil keputusan. Semakin banyaknya kedudukan dalam pengambil keputusan dalam kebijakan publik baik itu secara geografis ataupun organisasi maka akan semakin sulit suatu kebijakan atau program diimplementasikan.
- e) Pelaksana program. Pelaksana program yang memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan akan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.
- f) Sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang memadai dibutuhkan dalam proses implementasi suatu kebijakan atau program. Dengan adanya sumber daya akan mempermudah pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan prasarana.

2. *Context of implementation* (konteks implementasi)

Tidak hanya isi kebijakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, tetapi konteks kebijakan juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Karakter pelaksana dalam implementasi akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program. Menurut Grindle terdapat beberapa konteks implementasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut.

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Jika suatu kekuasaan politik merasa berkepentingan dalam suatu kebijakan atau program yang diimplementasikan maka mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati *output*-nya sehingga strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program yang diimplementasikan.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa. Pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik seperti “siapa mendapatkan apa” akan menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor.

d. Pendekatan David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Terdapat tiga kelompok besar variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program yang dikemukakan oleh Weimer dan Vining dalam (Suharno, 2013), yaitu sebagai berikut.

1. Logika kebijakan

Logika kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang ditetapkan harus masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan

Lingkungan akan berpengaruh dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program. Suatu kebijakan atau program bisa saja berhasil diterapkan di sebuah lingkungan, tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa kebijakan atau program tersebut dapat memiliki tingkat keberhasilan yang sama jika diterapkan di lingkungan lain. Kondisi lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan geografis.

3. Kemampuan implementor kebijakan

Kompetensi dan keterampilan implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program tentu akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Semakin kompeten implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program maka potensi keberhasilan kebijakan atau program tersebut semakin tinggi.

Berdasarkan beberapa pendekatan implementasi menurut para ahli di atas, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Situmorang, 2016) yang memiliki enam variabel dalam melihat keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program). Hal ini dikarenakan teori tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana terdapat beberapa variabel yang dapat dilihat untuk mengukur keberhasilan implementasi program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

2.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono dalam (Aviandani, 2022) terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijakan

Kegagalan suatu kebijakan atau program dapat terjadi karena ketidakjelasan isi kebijakan yang dilaksanakan, tujuan yang tidak terperinci, kurangnya ketetapan dari internal dan eksternal kebijakan atau program, serta terdapat kekurangan waktu, biaya/dana, sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi

Informasi menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan sebuah program dimana para pemegang peran atau implementor kebijakan perlu memiliki informasi mengenai program yang dilaksanakan agar masing-masing pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kekurangan informasi atau miskomunikasi yang terjadi dalam proses implementasi dapat menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi.

3. Dukungan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentu saja dukungan dari berbagai pihak sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan atau program. Suatu kebijakan atau program akan sulit untuk diimplementasikan apabila tidak mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kebijakan atau program tersebut.

4. Pembagian potensi

Pembagian potensi ini berkaitan dengan perbedaan antara tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah apabila terdapat pembagian tugas dan wewenang yang kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

2.4 Tinjauan Tentang Smart Village

Smart village merupakan konsep yang berasal dari *smart city*. Namun, terdapat perbedaan lokasi antara *smart village* dan *smart city*. Seperti namanya, *smart city* diimplementasikan di level kota, sedangkan *smart village* diimplementasikan di level desa. Menurut Pratt dalam (Subekti, 2019) *smart city* merupakan pengembangan konsep, implementasi, serta implementasi teknologi yang diterapkan pada suatu daerah sebagai interaksi kompleks antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. *Smart city* ini hadir sebagai jawaban atas tantangan yang terjadi di lingkungan perkotaan. Mengadopsi dari konsep *smart city* maka *smart village* memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan solusi pada masalah yang terjadi di pedesaan seperti masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan masalah lainnya yang sering terjadi di daerah pedesaan.

Dimensi *smart city* menurut Griffinger dalam Rachmawati (2018) meliputi enam dimensi, yaitu sebagai berikut.

1. *Smart economy*
2. *Smart people*
3. *Smart governance*
4. *Smart mobility*
5. *Smart environment*
6. *Smart living*

European Network mendefinisikan *smart village* sebagai daerah pedesaan dan masyarakat yang membangun kekuatan dan aset yang ada serta peluang baru untuk mengembangkan nilai tambah melalui peningkatan teknologi komunikasi digital, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik untuk kepentingan penduduk. Dalam tulisannya, EU Network for Rural Development menjelaskan mengenai bagaimana membuat sebuah pertanian di lingkungan pedesaan yang cerdas dan bagaimana membuat mobilitas antara kawasan desa dan kota yang cerdas serta bagaimana menciptakan sebuah energi yang cerdas untuk kawasan pedesaan. Sedangkan, menurut Brian Heap dalam (Subekti, 2019) *smart village* harus menekankan pada

peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap hak-hak mereka dan menuntut adanya pelibatan masyarakat dalam proses pemerintahan serta tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat.

Konsep pengembangan *smart village* ini tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan keadaan desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Konsep *smart village* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dari perkembangan konsep *smart city*. Unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan berada pada wilayah desa yang juga memerlukan adanya suatu pembaharuan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mempercepat perkembangan *smart city*.

Karakteristik wilayah desa, budaya, dan masyarakat yang homogen menjadi suatu alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak dapat disamakan dengan lingkup kota dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa.

a. Indikator *Smart Village*

Konsep *smart village* bergantung pada karakteristik wilayah dan visi pengembangan dengan menerapkan konsep tersebut dalam pembangunan dan pengelolaan kota. Beberapa penelitian mengemukakan dalam pengembangan *smart village* dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi atau variabel yang dikemukakan oleh Giffinger pada pedoman master plan *smart city* yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Pengembangan *smart village* memiliki dimensi yang lebih sesuai dengan kondisi pedesaan, yaitu pemerintah yang *smart*, masyarakat yang *smart*,

ekonomi yang *smart* dan lingkungan yang *smart*. Sedangkan *smart mobility*, *smart transportation* dan *smart people* dirasa kurang sesuai jika diimplementasikan pada pencapaian dalam *smart village*. Setiap variabel tersebut memiliki beberapa indikator dan parameter pengukuran ketercapaiannya. Herdiana (2019) mengemukakan 3 (tiga) indikator ketercapaian dalam konsep *smart village* sebagai dasar dari penerapan *smart village* yang sinergis antar ketiga indikator. Berikut merupakan tiga dimensi indikator dalam *smart village*.

1. *Smart Government*

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kasus ini pemerintah desa berada di posisi terendah pada struktur organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan di dalamnya termasuk pelayanan publik kepada masyarakat serta pembangunan desa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam konsep *smart village* pada pemerintahan desa dapat memudahkan proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa serta dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Indikator yang termasuk ke dalam *smart government*, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, ketersediaan layanan publik dan sosial serta transparansi tata kelola. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan koordinasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan. Ketersediaan layanan publik dan sosial diartikan sebagai ketersediaan pelayanan publik dan pengelola pengaduan masyarakat yang di berikan pemerintah secara *online*.

Smart government merupakan konsep atau langkah lanjutan dari *e-government* yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik. Tujuan implementasi *smart government* adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. *Smart government* identik dengan adanya penerapan *e-government* atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya guna mewujudkan transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik, dan pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mewadahi aspirasi masyarakat (Subekti, 2019).

2. *Smart Community*

Masyarakat merupakan tokoh utama dalam perumusan kebijakan dan pembangunan desa, bukan hanya sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga masyarakat pedesaan dituntut aktif dalam proses pengembangan desa guna merasakan manfaat dari adanya suatu program pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu peluang dalam pengoptimalan peran serta kontribusi dalam pengembangan desa. Berdasarkan pendapat Herdiana tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mengoptimalkan dan berkontribusi dalam pengembangan desa.

Smart community merupakan sebuah komunitas di mana anggota dari pemerintah daerah, pebisnis, pendidikan, lembaga maupun masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam menggunakan teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan cara positif dan signifikan.

3. *Smart Environment*

Pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing yang sangat berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Pada konsep *smart village*, suatu lingkungan bukan hanya berorientasi pada lingkungan alam saja, namun mencakup seluruh elemen yang membentuk karakter desa, yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial pada lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan pada tatanan alam terdiri dari pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat Herdiana (2019) mengenai *smart environment* tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan *smart environment* tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan lingkungan alam yang berkelanjutan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter desa yang mencakup tatanan sosial dari adat dan budaya sehingga nantinya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola dan melestarikan lingkungan dapat memperkuat nilai adat dan budaya yang ada di pedesaan.

Berdasarkan pendapat Herdiana (2019) mengenai indikator ketercapaian *smart village*, terdapat tiga poin penting yang harus dicapai dalam pelaksanaan *smart village*, yaitu *smart government* yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa, *smart community* yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat di pedesaan dapat turut aktif dalam membantu pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, dan *smart environment* yang berkaitan dengan bagaimana dalam mengembangkan desa yang cerdas tidak hanya berfokus pada pengembangan dan pelestarian lingkungan alam saja, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola lingkungan sehingga dapat memperkuat nilai adat dan budaya yang ada di pedesaan.

2.5 Kerangka Pikir

Desa Trimulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat yang menjadi sasaran program *smart village* Provinsi Lampung. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No.G/71/V.21/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung. Desa Trimulyo merupakan desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai pelaksanaan program *smart village* yang dilaksanakan di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Situmorang, 2016) untuk dapat melihat keberhasilan suatu program yang diimplementasikan terdapat beberapa variabel sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ukuran dan tujuan kebijakan ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian tujuan kebijakan. Tahapan indentifikasi berbagai indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam implementasi kebijakan karena indikator inilah yang dapat mengukur sejauhmana ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan ini berguna untuk menguraikan berbagai tujuan kebijakan secara menyeluruh dan menjelaskan apakah implementasi kebijakan yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Namun, terdapat beberapa kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Meter dan Van Horn mengemukakan dua kemungkinan alasan hal tersebut terjadi. Pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan berbagai kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber ini merupakan penunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan

ini mencakup sumber daya manusia (*human resources*) sebagai pelaksana kebijakan serta sumber dana (*non-human resources*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi sehingga berjalan dengan efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya sumber dana akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, sangat penting untuk memberikan perhatian terhadap kejelasan ukuran dan tujuan implementasi kebijakan dengan cara menjalin komunikasi yang baik antar aktor pelaksana sehingga ukuran dan tujuan kebijakan dapat dikomunikasikan dengan jelas dan para pelaksana dapat mengetahui apa yang menjadi ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan.
4. Karakteristik-karakteristik badan pelaksana
Komponen dari karakteristik badan-badan pelaksana ini memiliki ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut yang tidak formal dari personil mereka. Ikatan antar badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta penyampaian sistem kebijakan perlu diperhatikan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:
 - a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
 - b. Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
 - d. Vitalitas suatu organisasi;
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta

tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Kecenderungan pelaksana (implementor)

Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan para aktor pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, berbagai tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan tersebut. Pemahaman para pelaksana mengenai tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan menjadi hal yang penting. Jika implementasi suatu kebijakan ingin berhasil diimplementasikan maka harus ada kesadaran dari para pelaksana kebijakan. Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan juga menjadi hal yang penting. Para pelaksana suatu kebijakan mungkin saja gagal mengimplementasikan kebijakan jika dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan karena menolak tujuan yang ada dalam kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika para pelaksana menerima ukuran dasar dan tujuan kebijakan maka dapat mendorong implementasi berhasil dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

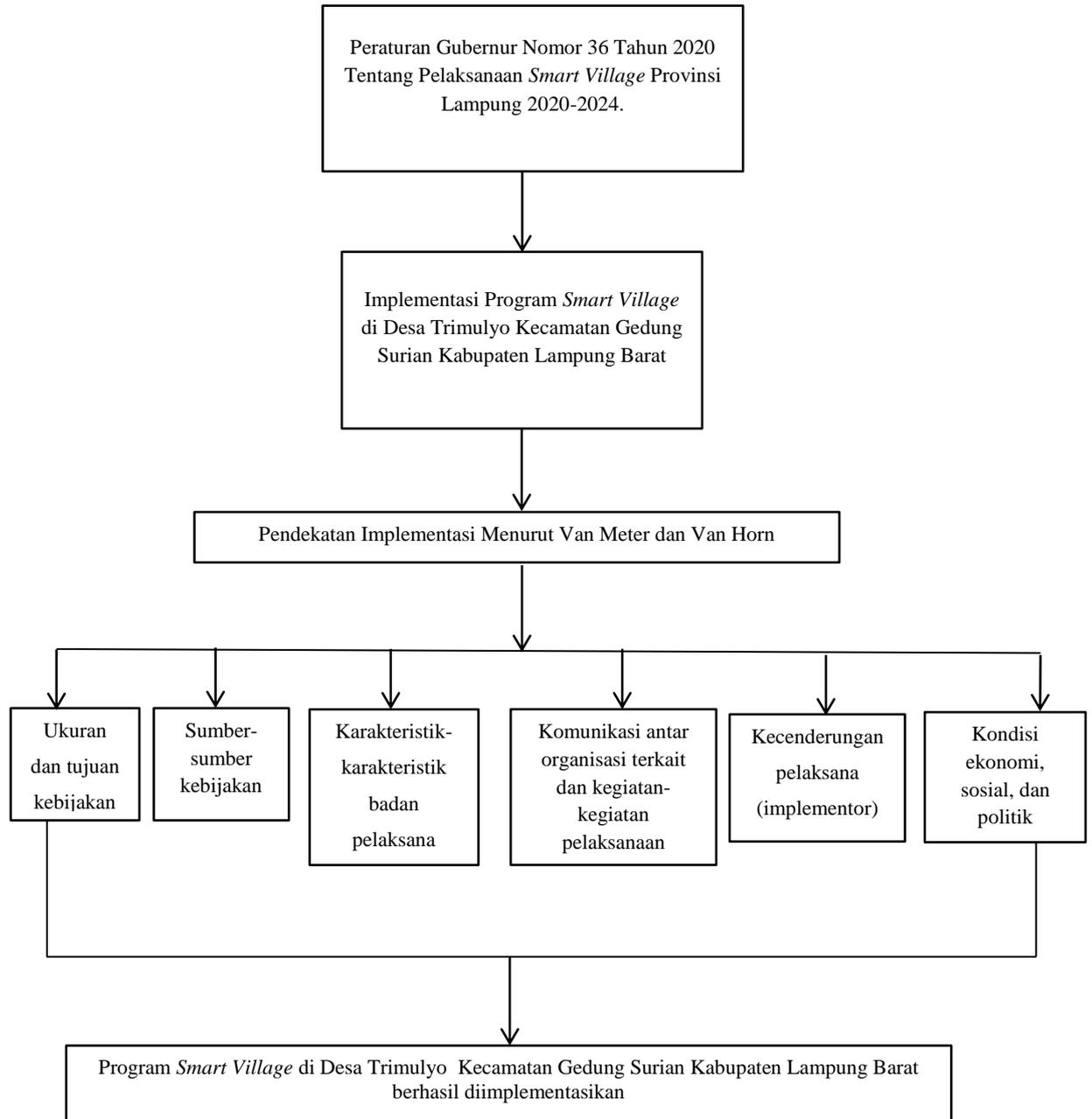
Menurut Van Meter dan Van Horn variabel mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik menjadi faktor yang berpengaruh dalam pencapaian implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn memberikan beberapa pertimbangan pernyataan terkait lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan, yaitu:

- a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?
- b. Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
- c. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
- d. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
- e. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
- f. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

Kerangka pikir penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

Gambar 3. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena pada penelitian ini peneliti menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan kondisi realitas dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut sehingga nantinya dapat terlihat implementasi dari program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Denzin & Lincoln dalam Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Dengan adanya fokus penelitian, maka peneliti akan lebih mudah untuk memahami masalah yang ada dan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pelaksanaan program *smart village* di

Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut sehingga nantinya dapat mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program *smart village* yang dilakukan di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat ini akan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Situmorang, 2016) untuk dapat melihat keberhasilan suatu program yang diimplementasikan terdapat beberapa variabel sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ukuran dan tujuan kebijakan ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian tujuan kebijakan. Tahapan indentifikasi berbagai indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam implementasi kebijakan karena indikator inilah yang dapat mengukur sejauhmana ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan ini berguna untuk menguraikan berbagai tujuan kebijakan secara menyeluruh dan menjelaskan apakah implementasi kebijakan yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Namun, terdapat beberapa kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Meter dan Van Horn mengemukakan dua kemungkinan alasan hal tersebut terjadi. Pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan berbagai kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber ini merupakan penunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan ini mencakup sumber daya manusia (*human resources*) sebagai pelaksana kebijakan serta sumber dana (*non-human resources*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi sehingga berjalan dengan

efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya sumber dana akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, sangat penting untuk memberikan perhatian terhadap kejelasan ukuran dan tujuan implementasi kebijakan dengan cara menjalin komunikasi yang baik antar aktor pelaksana sehingga ukuran dan tujuan kebijakan dapat dikomunikasikan dengan jelas dan para pelaksana dapat mengetahui apa yang menjadi ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan.
4. Karakteristik-karakteristik badan pelaksana
Komponen dari karakteristik badan-badan pelaksana ini memiliki ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut yang tidak formal dari personil mereka. Ikatan antar badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta penyampaian sistem kebijakan perlu diperhatikan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu :
 - a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
 - b. Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
 - d. Vitalitas suatu organisasi;
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
 - f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Kecenderungan pelaksana (implementor)

Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan para aktor pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, berbagai tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan tersebut. Pemahaman para pelaksana mengenai tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan menjadi hal yang penting. Jika implementasi suatu kebijakan ingin berhasil diimplementasikan maka harus ada kesadaran dari para pelaksana kebijakan. Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan juga menjadi hal yang penting. Para pelaksana suatu kebijakan mungkin saja gagal mengimplementasikan kebijakan jika dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan karena menolak tujuan yang ada dalam kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika para pelaksana menerima ukuran dasar dan tujuan kebijakan maka dapat mendorong implementasi berhasil dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Menurut Van Meter dan Van Horn variabel mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik menjadi faktor yang berpengaruh dalam pencapaian implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn memberikan beberapa pertimbangan pernyataan terkait lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan, yaitu:

- a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?

- b. Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
- c. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
- d. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
- e. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
- f. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Desa Trimulyo merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Latar belakang pemilihan lokasi penelitian ini karena Lampung Barat sempat masuk dalam daftar daerah tertinggal di Provinsi Lampung. Namun, pada tahun 2019 Lampung Barat telah keluar dari status daerah tertinggal di Provinsi Lampung. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Trimulyo Kabupaten Lampung Barat untuk melihat sejauh mana perkembangan Lampung Barat saat ini khususnya di Desa Trimulyo yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program *smart village*. Selain itu, Desa Trimulyo juga terkenal dengan destinasi wisatanya yang menarik banyak wisatawan, yaitu Temiangan *Hill* yang menjadikan Desa Trimulyo dikenal oleh banyak orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Sedangkan, data sekunder diperoleh peneliti bukan berasal dari tangan pertama, melainkan tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam memperoleh data sekunder, peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengamatan atau observasi, namun data diperoleh dari media massa, jurnal, artikel, data hasil penelitian lain, dan penelitian kepustakaan untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan data. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh oleh peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian serta observasi di lokasi penelitian untuk melihat secara langsung pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam melakukan penelitian. Melalui pengumpulan data peneliti akan mendapatkan data yang menjadi tujuan utama dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi untuk data primer, serta dokumentasi untuk data sekunder.

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian dilakukan oleh peneliti selaku pemandu jalannya percakapan agar sesuai dengan topik penelitian. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui informan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada informan-informan yang terlibat aktif dengan penelitian. Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun panduan wawancara terkait fokus penelitian yang dilakukan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program *smart village* yang dilakukan di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Berikut ini beberapa narasumber dalam wawancara yang akan diwawancarai terkait implementasi program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2. Narasumber Wawancara

No.	Narasumber	Jabatan
1.	Buchori, S.P	Kepala Desa Trimulyo
2.	Hadi Waluyo	Kasi Kesejahteraan Desa Trimulyo/Penanggungjawab pelaksanaan program <i>smart village</i>

3.	Supriadi	Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Trimulyo
4.	Iswanto	Ketua POKDARWIS Desa Trimulyo
5.	Fitriyah	Kepala Dusun Air Dingin 2
6.	Adi Santoso	Kepala Dusun Air Dingin 6
7.	Siswono	Kepala Dusun Air Dadapan 2
8.	Desi Kurniasari	Bendahara BumDes Desa Trimulyo
9.	Ria Akfria Julia Nasir, S.STP	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD Kabupaten Lampung Barat
10.	Vevi Fitriliani	Staff Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat
11.	Zulkarnain, S.IP	Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data primer juga dilakukan melalui observasi kepada beberapa daerah. Observasi ialah kegiatan mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam lainnya (Sugiyono, 2013). Proses observasi dilakukan agar peneliti dapat melihat dan menilai secara langsung objek penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan melihat langsung bagaimana jalannya program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat serta hambatan apa yang dirasakan dalam pelaksanaan program *smart village*.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2013). Dokumentasi dalam penelitian ini

diperlukan untuk memperoleh data agar kemudian dapat di analisis oleh peneliti. Adapun dokumen yang digunakan ialah dokumen terkait proses pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Menurut Huberman dan Miles dalam (Hardani, 2020) terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis data, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh selama melakukan penelitian tentunya sangat bermacam-macam, maka dari itu perlu dilakukan reduksi data untuk memudahkan peneliti dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi dan memfokuskan mana saja data yang berkaitan dengan pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam proses reduksi. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara mengenai pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian

Kabupaten Lampung Barat serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut sehingga informasi yang di tampilkan mendapatkan kesimpulan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses yang dilakukan untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi ini peneliti menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data derajat kepercayaan (*credibility*), dengan menggunakan teknik:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini merupakan cara pengecekan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama sehingga nantinya didapatkan data yang valid dari berbagai cara pengumpulan data yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

2. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk dijadikan sebagai data pendukung dan membuktikan data yang telah diperoleh oleh peneliti valid. Kecukupan referensi yang digunakan oleh peneliti, yaitu alat perekam wawancara serta berbagai data tentang gambaran keadaan penelitian yang didukung oleh foto-foto. Rekaman wawancara tersebut peneliti gunakan untuk mendukung dan mempermudah dalam mencatat data dan membandingkan data dari para informan di lapangan. Sedangkan, foto-foto yang berkaitan dengan penelitian digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013) mengenai kecukupan bahan referensi, yaitu adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “Implementasi Program *Smart Village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat” maka kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Program *Smart Village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat mencakup beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya, yaitu realisasi *smart government* dengan penggunaan website Pemerintah Desa Trimulyo dan tersedianya pelayanan administrasi terpadu (Trimulyo Service Center). Realisasi *smart community* melalui pemasaran pariwisata Temiangan *Hill* oleh Pokdarwis Desa Trimulyo melalui media sosial dan pemanfaatan teknologi dalam pembayaran pajak online oleh BumDes Trimulyo. Kemudian, realisasi *smart environment* melalui pemanfaatan alam menjadi objek wisata serta mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan lingkungan.

Berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Desa Trimulyo dalam melaksanakan implementasi program *smart village* ini, jika dilihat dari indikator keberhasilan dari Van Meter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan yang telah dilakukan oleh Desa Trimulyo sebagai salah satu desa sasaran pelaksanaan program *smart village* di Provinsi Lampung sudah jelas. Untuk indikator pencapaian program *smart village* juga telah terealisasi, yaitu *smart government* dan

smart community, dan *smart environment*. Indikator sumber-sumber kebijakan ini mencakup sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Jika dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Desa Trimulyo dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia belum maksimal. Selain itu, dalam proses pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo juga mengalami keterbatasan anggaran dan untuk menunjang pelaksanaan program *smart village*. Indikator komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Trimulyo sudah berjalan efektif dengan menggunakan model komunikasi konvergen. Indikator karakteristik-karakteristik agen pelaksana yang terbuka dan cukup menerima dengan baik adanya program *smart village* di Desa Trimulyo membuat pelaksanaan program berjalan dengan baik. Indikator kecenderungan pelaksana (implementor) yang cenderung menerima dengan baik pelaksanaan program *smart village*, namun masih terdapat banyak perangkat desa maupun masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo. Serta indikator kondisi ekonomi, sosial, dan politik dimana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik cukup kondusif untuk melaksanakan program *smart village* di Desa Trimulyo.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Program *Smart Village* di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.
 - a. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya finansial dalam proses pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo.
 - b. Karakteristik masyarakat yang cenderung menerima adanya program *smart village*, tetapi kurang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut.

1. Mengadakan rapat rutin mengenai progres pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo agar aparat Desa Trimulyo dapat turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program *smart village* di Desa Trimulyo.
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui sosialisasi ataupun pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat Desa Trimulyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aminah, S. (2014). Perubahan Model Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Pembangunan dala Perspektif Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(1), 92-103.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifin, N. (2013). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jepara: Unisnu Press.
- Aviandani, K. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Respon Publik*, 16 (6), 43-52.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitrianti, A. A. (2021). Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 1-17.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Herdiana, D. (2019). Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia. *Jurnal Pengembangan*, 1-16.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati.

- Nirmala, T. (2022). Pengembangan Smart Village Menuju Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Indonesia Collaboration Journal of Community Services*, 2(4), 267-273.
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), 12-18.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSID).
- Sopiansyah, T., Djumlani, A., & Utomo, H.S. (2017). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 4(3), 194-204.
- Sore, U. B., Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Subekti, T, & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boong Pring Sanankerto Tureh Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18-23.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.